

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN OBJEKTIFITAS
TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT DAERAH
(Survey Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)**

Oleh:

Kamal Ma'ruf & Mutia Fakhrunnisa
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
email : kamalmaruf2207@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas audit ditentukan oleh beberapa hal diantaranya yaitu kompetensi, independensi dan objektivitas.

Tujuan penelitian ini untuk menguji seberapa besar pengaruh dari kompetensi, independensi, dan objektivitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Sedangkan untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi berganda, setelah sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi, independensi dan objektivitas mempengaruhi kualitas audit. Besarnya pengaruh kompetensi, independensi, dan objektivitas terhadap kualitas audit sebesar 61.9% dan sisanya 38.1% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar penelitian.
Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Kualitas Audit.

ABSTRACT

Audit quality is stabilized by several things there are competence, independence and objectivity.

The purpose of this research is testing how much the influence from competence, independence and objectivity about the audit quality to Inspectorate of West Java. The method used is survey method with system questionier. The sampel that used are 40 respondents. While for answering this research hypothesis is using multiple analysis regression, after previously did classic assumption test. Based on the result of research that is prove the competence, independence and objectivity influence the audit quality. The quantities influence of competence, independence and objectivity about audit quality is 61.9% and 38.1% is influence by othe other independent variable outside the research.

Key word : Competence, Independence, Objectivity, Audit quality.

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan negara sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan pada praktiknya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara efisien, dan efektif.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan

penting auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam melakukan audit terkadang auditor menemui kendala dalam proses pelaksanaannya yaitu adanya rasa kekeluargaan, kekerabatan, kebersamaan, dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas auditor adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Fenomena yang terjadi di Inspektorat Provinsi Jawa Barat seperti yang diungkapkan oleh salah satu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yaitu ketika auditor internal menjalankan aktivitas auditing internal. Internal auditor akan menjumpai masalah ketika harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak menguntungkan dalam penilaian kinerja manajemen atau obyek audit, sementara internal auditor pernah menerima gratifikasi dari obyek audit. Ketika manajemen atau obyek audit menawarkan sebuah imbalan atau tekanan kepada internal auditor untuk menghasilkan laporan audit yang diinginkan oleh manajemen maka menjadi dilema

etika. Untuk itu auditor dihadapkan kepada pilihan-pilihan keputusan yang terkait dengan hal-hal keputusan etis dan tidak etis. Hal tersebut diatas mengakibatkan auditor dalam melaksanakan audit sering tidak independen dan objektif.

Adanya fenomena tersebut berpengaruh terhadap pengguna laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Dengan adanya aturan tersebut masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam **Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007**. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. **Mardiasmo (2004:192)** menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Audit yang dilakukan oleh APIP selain mengacu kepada Standar Audit juga harus mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit (**Peraturan**

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008). Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor salah satunya yaitu objektivitas. Objektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa independensi serta objektivitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan auditor meningkat. Independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik, sedangkan objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh auditor. Prinsip objektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain (**Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, 2001**). Tetapi dalam kenyataannya belum tentu auditor yang memiliki hal tersebut akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik karena tidak mudah menjaga independensi dan objektivitas.

Seorang auditor yang memadai dituntut memiliki independensi yang tinggi, kompetensi yang memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi audit, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab audit yang efektif. Dengan kata lain, jika seorang auditor memiliki kompetensi, independensi, dan objektivitasnya yang tinggi dalam

memeriksa laporan keuangan pemerintah, maka hasil audit yang dihasilkan berkualitas dan dapat diandalkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif/hubungan. Menurut Sugiyono (2004:11) metode penelitian asosiatif yaitu:

“Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih”.

Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t untuk menguji secara parsial. Dari hasil perhitungan dihasilkan t_{hitung} sebesar 5.567 dan t_{tabel} 2.021, jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil tersebut menunjukkan penolakan H_0 , artinya bahwa kompetensi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan standar akuntansi dan auditing sangat mempengaruhi auditor ketika melaksanakan audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin auditor paham mengenai standar akuntansi dan auditing, hasil audit tersebut akan berkualitas. Hal

ini sebagaimana dinyatakan dalam lampiran 2 SPKN sebagai berikut: “Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa”. Dengan demikian hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pada penelitian ini independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan

b. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t untuk menguji pengaruh secara parsial. Dari hasil perhitungan dihasilkan t_{hitung} sebesar 6.272 dan t_{tabel} 2.021, jadi $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} . Hasil tersebut menunjukkan penolakan H_0 , artinya bahwa independensi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor telah independen walaupun memiliki kepentingan keuangan dengan klien juga tidak peduli akan dimutasi apabila mengungkapkan temuan apa adanya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya independensi berarti adanya kejujuran dalam diri auditor ketika melakukan proses audit yang sesuai dengan fakta sehingga hasil audit yang dihasilkan berkualitas.

c. Pengaruh Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit

Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t untuk menguji pengaruh secara parsial. Dari hasil perhitungan dihasilkan t_{hitung} sebesar 4.905 dan t_{tabel} 2.021, jadi $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} hasil tersebut menunjukkan penolakan H_0 , artinya bahwa objektivitas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor telah bertindak adil tanpa tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit, juga dalam menjalankan tugasnya auditor tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak yang berkepentingan, sehingga auditor dapat mengemukakan pendapat dengan apa adanya sehingga menghasilkan laporan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan mengemukakan pendapat menurut apa adanya karena dengan adanya objektivitas maka laporan yang dihasilkan akan sesuai dengan yang seharusnya sehingga berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

d. Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Secara Simultan

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi dan objektivitas terhadap kualitas audit secara bersama. Dari perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} 19.498 dan F_{tabel} 2.866, artinya $F_{hitung} >$ F_{tabel} , hasil tersebut menunjukkan penolakan H_0 yang berarti secara

simultan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kompetensi, independensi dan objektivitas terhadap kualitas audit.

Dari hasil penelitian secara simultan dapat diketahui bahwa kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Barat dapat ditentukan oleh faktor kompetensi, independensi dan objektivitas yang terlihat pada koefisien korelasi variabel Kompetensi (X_1), Independensi (X_2), dan Objektivitas (X_3) sebesar 0,619. Nilai tersebut berada antara nilai 0.60 – 0.799, artinya memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan Kualitas Audit. Besarnya kontribusi variabel X terhadap Variabel Y sebesar 61,9% dan sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensi yang dimilikinya. Dengan penguasaan standar akuntansi dan auditing juga wawasan auditor mengenai pemerintahan, auditor akan lebih memahami dan lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan sesuai dengan standar yang berlaku. Tanpa penguasaan standar akuntansi dan auditing serta wawasan auditor mengenai pemerintahan, kualitas audit yang dihasilkan tidak dapat diandalkan. Adapun independensi dapat mempengaruhi kualitas audit karena jika auditor benar-benar independen, auditor tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh baik ekstern maupun intern. Dengan independensi yang dimiliki auditor, auditor akan leluasa melakukan tugas-tugas auditnya. Selanjutnya,

tingkat objektivitas auditor yang tinggi akan memudahkan auditor dalam melaksanakan tugas-tugas auditnya sesuai aturan yang berlaku karena auditor dapat bertindak jujur, juga tidak dipengaruhi pandangan subjektif pihak yang berkepentingan, sehingga hasil audit akan sesuai dan berkualitas. Tanpa objektivitas yang dimiliki auditor, dalam menjalankan tugasnya auditor akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan hasil auditnya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak dapat diandalkan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi, independensi dan objektivitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Peningkatan kompetensi yang dimiliki auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.
2. Independensi auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Independensi yang

- tinggi yang dimiliki auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.
3. Objektivitas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Independensi yang tinggi yang dimiliki auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.
 4. Kompetensi, independensi dan objektivitas berpengaruh secara simulatan terhadap kualitas audit. Peningkatan kompetensi dan tingginya independensi serta objektivitas auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Regulation, Journal of Accounting and Economics 3. Agustus. p. 113-127, 1981.

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.

Mulyadi. 2010. *Auditing*. Edisi ke Enam. Jilid 1. Salemba Empat: Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi.

Permenpan PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Riduwan, Akdon. 2006. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Sulaiman, Wahid. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Andi: Yogyakarta

Sunarto. 2003. *Auditing*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Penerbit Panduan. Yogyakarta.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grajindo Persa

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Edisi keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Arens, Alvin A; Randal J. Elder; Mark S. Beasley. 2012. *Auditing and Assurance Services*, 14th edition. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Ashari & Santosa, Purbaya Budi. 2005. *Analisa Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- De Angelo, L.E. *Auditor Independence, "Low Balling" and Disclosur*